

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul:

Sejak pembatasan tekstil dari Indonesia oleh Amerika Serikat dan Jepang pada akhir tahun 2004, Pemerintah Indonesia harus lebih aktif memperluas pasar tekstil dan produk tekstil di negara-negara lain di luar dua negara tersebut. Hal ini harus dilakukan karena hasil industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang terserap pasar domestik hanya sebesar 30% sedangkan 70%-nya adalah untuk pasar ekspor¹. Kuota dari Amerika Serikat dan Jepang merupakan alasan pertama perlunya perluasan pasar. Alasan kedua, tekstil Indonesia saat ini menghadapi persaingan ketat dari Cina dan India. Negara tujuan ekspor yang dituju adalah Uni Eropa yang sekarang semakin luas pasarnya seiring dengan bertambahnya negara-negara anggota Uni Eropa. Pemerintah Indonesia perlu memiliki strategi kebijakan yang dapat mendorong ekspor tekstil dan produk tekstil ke Uni Eropa. Apabila industri tekstil tidak didukung sepenuhnya oleh pemerintah, maka potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di pabrik-pabrik tekstil akan semakin besar. Judul ini diambil karena perluasan pasar tekstil dan produk tekstil (TPT) semakin mendesak mengingat industri tekstil semakin terpukul akibat krisis moneter global yang diperkirakan baru akan berakhir 2 tahun lagi atau akhir 2010.

¹ Pasar Ekspor Tekstil RI Beralih ke Eropa, dalam www.kapanlagi.com., diakses 21 November 2008.

B. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara pengekspor tekstil dan produk tekstil dunia, tahun 1996 Indonesia menempati posisi ke 10 dengan nilai ekspor sebesar US\$ 6,8 milyar, sementara pada tahun 2000 berada pada posisi ke 17 nilai ekspor sebesar US\$ 8,3 milyar². Posisi ekspor tekstil dan produk tekstil nasional di pasar dunia menunjukkan penurunan tingkat daya saing. Hal ini perlu dicermati bahwa Indonesia tidak dapat mengharapkan pertumbuhan ekspor yang tinggi hanya dengan bertahan pada produk bernilai tambah yang rendah. Tekstil dan produk tekstil merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia yang mampu memberikan perolehan devisa. Selain menghasilkan devisa, ekspor TPT juga sangat bermanfaat bagi kelangsungan pembiayaan pembangunan.

Dalam pengembangan perekonomian bagi negara berkembang seperti Indonesia, industri tekstil dan produk tekstil masih merupakan industri yang mendapatkan prioritas untuk dikembangkan. Hal tersebut sangat beralasan, mengingat industri jenis ini pada umumnya masih bersifat padat karya sehingga mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah cukup banyak.

Sementara eskpor tekstil ke negara Amerika Serikat (AS) dan Jepang mengalami penurunan disebabkan masyarakat di dua negara itu mengutamakan pembelian bahan pangan, Uni Eropa menjadi salah satu tujuan ekspor tekstil dan produk tekstil yang yang dapat dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Ekspor tekstil Indonesia ke Uni Eropa (UE) mengalami

² Kebijakan Ekspor Tekstil Dan Produk Tekstil (TPT) Pasca Kuota, www.textile.web.id, diakses 21 November 2008.

kenaikan selama Mei sampai Juni 2008. Kenaikan ekspor itu disebabkan jumlah negara yang tergabung di UE jumlahnya cukup banyak, yakni 25 negara. Sebenarnya Uni Eropa telah lama menjadi salah satu negara tujuan ekspor tekstil. Berturut-turut, nilai ekspor tekstil dan produk tekstil Indonesia mengalami peningkatan tercatat US\$ 8,56 milyar pada tahun 2005, sebanyak US\$ 9,3 milyar pada tahun 2006, dan sebesar US\$ 10,06 milyar pada tahun 2007. Walaupun Amerika Serikat sedang dilanda krisis hebat, Amerika Serikat tetap masih memegang porsi pasar terbesar sebesar 36%, diikuti Uni Eropa 13%, ASEAN 7,21% dan Jepang 5%. Sedangkan sisanya menuju pasar-pasar baru seperti Timur Tengah, Afrika dan Amerika Selatan.³ Diperkirakan pada tahun 2008, ekspor ke Amerika Serikat hanya mencapai 21% sehingga perlu adanya perluasan pasar di luar Amerika Serikat, termasuk ke Uni Eropa.⁴ Pada tahun-tahun ke depan, diharapkan Uni Eropa akan memberi kontribusi ekspor tekstil dan produk tekstil nasional sebesar 23-24%⁵.

Hanya saja, Indonesia akan menghadapi persaingan dari negara-negara industri tekstil lainnya seperti Cina dan India. Sektor tekstil sebagai komoditas ekspor di Indonesia masih dihadapkan kepada permasalahan-permasalahan yang bersifat klasik dan dinamis yaitu daya saing, mutu dan biaya operasional perusahaan yang tinggi. Di lain pihak ketidakstabilan sektor moneter dan lembaga perbankan disertai dengan tingginya tingkat bunga mengakibatkan

³ Ekspor Tekstil Tersandung L/C, www.inilah.com, diakses tanggal 22 Desember 2008

⁴ Ekspor Tekstil Beralih ke Eropa, www.inilah.com, diakses tanggal 22 Desember 2008

⁵ Pasar Ekspor Tekstil RI Beralih ke Eropa, dalam www.kapanlagi.com., diakses 21 November 2008

terganggunya akumulasi modal kerja dalam melakukan kegiatan perdagangan internasional. Pembiayaan ekspor (*pre-ship-ment & post shipment*) sebagai bagian dari ongkos produksi menjadi meningkat tinggi dan tidak lancar.⁶

Masalah lain yang diakibatkan ketidakstabilan sektor moneter dan perbankan adalah tingkat kepercayaan bank mitra dagang asing yang semakin menurun; sistem pembayaran luar negeri dalam bentuk L/C menjadi sulit dilaksanakan, karena persyaratan *margin deposit* yang sangat tinggi (100%-130%). Sementara fasilitas *financing* melalui skema-skema yang ditawarkan pemerintah atas hasil kerjasama bilateral masih belum dapat menolong, karena negara penjamin menghendaki *criteria white list* dan produk yang akan diimpor dari negara penjamin (yang pada umumnya adalah produk pertanian), tidak sesuai dengan yang dibutuhkan industri dalam negeri (bahan baku dan penolong)⁷.

Ekspor tekstil dan produk tekstil ke Uni Eropa harus didukung dengan kebijakan pemerintah Indonesia secara penuh untuk menyelamatkan industri tekstil Indonesia. Kebijakan yang dilakukan bukan hanya pada aspek yang langsung berkaitan dengan ekspor seperti pajak, retribusi, prosedur ekspor, promosi dan sebagainya. Tetapi lebih jauh lagi adalah mengusahakan penguatan daya saing industri tekstil Indonesia. Seperti diketahui, industri tekstil Indonesia dihadapkan pada komponen impor yang tetap tinggi dan mesin-mesin tekstil yang sudah tua.

⁶ Kebijakan Ekspor Tekstil Dan Produk Tekstil (TPT) Pasca Kuota, artikel dalam www.textile.web.id, diakses tanggal 21 November 2008

⁷ Ekspor Tekstil Tersandung L/C, www.inilah.com, diakses tanggal 22 Desember 2008

Guna menghadapi persaingan ketat di pasar global diupayakan melalui efisiensi produksi, kesinambungan dan ketepatan waktu pemasokan serta peningkatan mutu sesuai dengan persyaratan konsumen. Terhadap persyaratan yang langsung dikendaki oleh masyarakat konsumen di negara pembeli antara lain seperti desain, mutu produk maupun pengaruhnya terhadap pemerintah memberikan dorongan dan fasilitasnya untuk menetapkan standar-standar internasional seperti ISO seri 9000 (Standar Manajemen Mutu) dan ISO seri 14000 (Standar Mutu Manajemen Lingkungan).

Uni Eropa dipilih sebagai tujuan perluasan ekspor karena pangsa pasarnya semakin luas. Data yang tercatat untuk volume pasar UE untuk kebutuhan pakaiannya mencapai nilai 215 milyar Euro dimana sepertiga dari kebutuhan tersebut (72,1 milyar Euro dalam tahun 2001) dipenuhi oleh impor dengan menggunakan fasilitas kuota yang diberikan kepada produsen tekstil negara-negara berkembang. Melihat besarnya potensi pasar tersebut, negara-negara produsen tekstil berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan kuota yang didapatnya. Pada saat yang sama produsen tekstil di negara yang tidak dikenakan kuota berlomba mencari akses untuk dapat masuk dan merebut pasar sebesar-besarnya di UE. Umumnya negara-negara tersebut menempuh jalan dengan mencari pintu/akses negara tertentu yang digunakan sebagai pusat pemasaran produknya keseluruh Uni Eropa. Karena apabila satu negara dapat masuk dan menguasai pasar di salah satu anggota UE maka produknya akan dengan mudah untuk dipasarkan keseluruh anggota UE dan dengan demikian akan terbuka jalan untuk menembus pasar UE secara keseluruhan⁸.

⁸ Men's/Boy Garment Indonesia di Pasar Belgia, www.indonesiamission-eu.org, diakses tanggal 25 Desember 2008

Konsumsi pakaian jadi rata-rata perorang di Uni Eropa pada tahun 2000 adalah 630 Euro per tahunnya. Potensi yang besar tersebut 30%nya adalah konsumsi kelompok pakaian jadi *outwear*. Impor tahun 2000 untuk pakaian jadi kelompok *outwear* mengalami pertumbuhan 14% dibandingkan tahun 1998 dan 1999 dengan nilai 63,3 milyar Euro. Tujuan utama pasar produk ini adalah Jerman dengan pangsa impornya sebesar 27% diikuti oleh Inggris 17%, Perancis (15%), Italia (8%) dan Belanda (7%) dari total impor UE. Sejak tahun 2001 pasar pakaian jadi UE dipenuhi oleh produk-produk pakaian jadi dengan harga yang murah dan diproduksi secara massal. Walaupun demikian tuntutan akan produk yang berkualitas tetap menjadi syarat utama konsumen di Uni Eropa⁹.

Bagi Uni Eropa, Indonesia merupakan pemasok tekstil dan produk tekstil kesepuluh terbesar dengan share 1,2% (1,57 juta Euro) pada tahun 2006. Pesaing utama Indonesia di Uni Eropa adalah China yang mendominasi pangsa pasar Eropa, diikuti India dan Turki. Posisi Indonesia di Eropa cenderung stagnan. Sebaliknya, posisi negara-negara yang berdekatan secara geografis dengan Eropa cenderung menguat.¹⁰ Pertumbuhan ekspor tekstil dan produk tekstil Indonesia ke UE maupun Belgia saat ini sebagian besar mengandalkan fasilitas kuota. Namun demikian dengan dihapuskannya kuota mulai 1 Januari 2005, maka tekstil dan produk tekstil Indonesia akan diuji kemampuannya. Semua tekstil dan produk tekstil yang masuk ke UE akan

⁹ Loc. cit.

¹⁰ Ermina Miranti, Mencermati Kinerja Tekstil Indonesia : Antara potensi dan peluang, *Economic Review* . No. 209 . September 2007, hal 7.

bersaing secara bebas dan semua negara akan mempunyai kesempatan yang sama. Berkenaan dengan hal tersebut hendaknya industri tekstil dan produk tekstil Indonesia tidak lagi mengandalkan daya saingnya pada kuota sebagai *captive market*, tetapi sudah harus mempersiapkan sedini mungkin melalui upaya peningkatan efisiensi dan kualitas produk sehingga mampu bersaing di pasar bebas, terlebih saat ini upah buruh rendah yang selalu menjadi andalan bagi pertumbuhan industri Indonesia terus meningkat dan tidak lagi menjadi andalan sebagai salah satu keuntungan komparatif (*comparative advantage*).

Peningkatan ekspor tekstil ke Uni Eropa, selain dihadapkan pada persaingan, juga dihadapkan pada sikap Uni Eropa yang lebih selektif dalam menentukan kualitas produk, tidak hanya dilihat dari kualitas barangnya, tetapi juga kualitas selama proses pembuatan yang dikaitkan dengan hak-hak buruh, pencemaran lingkungan dan sebagainya. Karena itu, kebijakan peningkatan ekspor harus berdasarkan pada visi jangka panjang dan komprehensif sehingga perluasan ekspor dapat terus berlanjut.

Dibutuhkan suatu strategi kebijakan yang komprehensif dalam mendukung pengembangan ekspor TPT sebagai bagian dari strategi peningkatan ekspor nasional. Strategi ini mensyaratkan adanya langkah-langkah besar dan fundamental dengan melibatkan berbagai pihak, seperti perbankan, departemen perindustrian, departemen perdagangan, asosiasi pertekstilan, pengusaha, serta serikat buruh sektor tekstil. Kebijakan tidak hanya pada bagian hilir seperti subsidi ekspor dan promosi dagang, tetapi juga

pada bagian hulu seperti subsidi bahan impor, kredit lunak perbankan, penyediaan infrastruktur yang layak dan sebagainya. Dilihat dari masalahnya, strategi yang diambil dapat menggunakan strategi internal dan eksternal. Strategi internal di antaranya dengan menguatkan daya saing industri TPT dengan cara memberikan berbagai kemudahan pada aspek bahan mentah/baku, perbankan, pengangkutan dan infrastruktur serta keamanan. Strategi eksternal di antaranya dengan memanfaatkan berbagai kerjasama dagang dengan negara lain.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan berikut: Bagaimana strategi Indonesia dalam menghadapi persaingan dengan negara-negara penghasil tekstil lainnya guna memperluas pasar ekspor tekstil di Uni Eropa?

D. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini mencakup kebijakan politik perdagangan Indonesia di Uni Eropa serta kebijakan Indonesia dalam melindungi industri tekstil Indonesia dari ketatnya persaingan pasar tekstil di dunia, khususnya di Uni Eropa, baik kebijakan dalam aspek ekspor-impor ataupun peningkatan mutu industri tekstil dan produk tekstil. Cakupan waktunya mulai dari tahun 2005 yaitu sejak adanya pembatasan ekspor oleh Amerika Serikat hingga 2008.

E. Kerangka Teori

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam mendorong ekspor tekstil tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan pemerintah, pengaruh pasar internasional terhadap ekonomi domestik, dan motivasi-motivasi para elit dalam pengambilan keputusan untuk mendapatkan keuntungan. Kajian terhadap strategi perluasan ekspor tekstil dilakukan berdasarkan pada teori perdagangan internasional dan teori pengambilan keputusan. Teori perdagangan internasional merujuk pada paradigma merkantilisme yang menyebutkan adanya hubungan erat antara ekonomi dan politik sehingga langkah-langkah politik oleh suatu negara dapat dilakukan agar perekonomian menjadi lebih baik. Karena itu, persoalan peningkatan ekspor tekstil dapat diupayakan melalui upaya politik luar negeri guna menjalin perdagangan dengan negara tujuan ekspor dan upaya politik ekonomi yang langsung ditujukan kepada industri TPT di Indonesia.

1. Teori Pengambilan Keputusan

Keputusan pemerintah meningkatkan ekspor tekstil ke Uni Eropa sudah pasti dilatar belakangi oleh motif-motif pemerintah. Menurut Snyder, Bruck, dan Sapin, pengertian pembuatan keputusan (*decision making*) adalah sebagai suatu rangkaian kegiatan yang menghasilkan pemilihan sebarang tindakan dari seperangkat alternatif tindakan secara sosial, yang dimaksudkan untuk menghasilkan keadaan khusus di masa mendatang yang dibayangkan oleh pembuat keputusan.¹¹

¹¹ Richard C. Snyder, H. W. Bruck, dan Burton Sapin, *Foreign Policy Decision-Making: An Approach to the Study of International Politics*, Free Press, New York, 1962, hal 27

Graham Allison mengajukan tiga model teori pengambilan keputusan yang dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan politik luar negeri suatu negara. Pertama, *the rational-actor model*. Menurut model ini, kebijakan dikeluarkan berdasarkan logika atau rasionalitas untuk mencapai tujuan atau kepentingan pemerintah. Kebijakan atau tindakan-tindakan selalu dikaitkan dengan sejumlah keuntungan-keuntungan sehingga setiap keputusan yang diambil adalah hasil dari berbagai alternatif keputusan. Aktor pengambil keputusan biasanya terpenggil untuk mengkaitkan keuntungan-keuntungan tersebut dengan upaya mencapai kepentingan-kepentingan nasional.¹² Para aktor yang berperan dalam mengembangkan ekspor tekstil menjadikan kepentingan nasional Indonesia seperti devisa dan kesempatan kerja sebagai alasan untuk mengambil suatu tindakan politik.

Kedua, *an organizational-process model*. Menurut model ini, kebijakan suatu negara merupakan wujud dari perilaku pemerintah, sedangkan pemerintah sendiri merupakan hasil dari interaksi organisasi-organisasi besar di negara bersangkutan.¹³ Dari sekian banyak organisasi tersebut, hanya sebagian kecil saja yang berinteraksi dengan kepala negara atau pemimpin pemerintahan. Karena itu, analisis juga perlu melihat organisasi apa saja yang menjalin interaksi dengan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dalam

¹² James E. Dougherty & Robert L. Pfaltzgraff, Jr, *Contending Theories of International Relations, A Comprehensive Survey, Fourth Edition*, Newyork: Longman, 1996, hal 465

¹³ *Ibid*, hal 465

organisasi pemerintahan umumnya mengikuti rutinitas atau prosedur kerja organisasi. Pengambilan keputusan oleh pemerintah suatu negara pada dasarnya berfungsi untuk memecahkan masalah, baik dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Meskipun demikian, dalam situasi krisis, pengambilan keputusan sering tidak melalui prosedur atau rutinitas organisasi pemerintahan.¹⁴ Dalam masalah pengembangan ekspor tekstil dan produk tekstil ke Uni Eropa, institusi yang mengambil keputusan adalah Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta Departemen Luar Negeri. Sedangkan pihak swasta adalah asosiasi pengusaha tekstil Indonesia.

Ketiga, *beraucratic-politic model*. Menurut model ini, pengambilan keputusan oleh suatu negara terjadi melalui proses persaingan politik di antara unit-unit pengambilan kebijakan. Politik luar negeri suatu negara merupakan hasil dari tarik-menarik bargaining antar berbagai komponen pemerintah sehingga politik luar negerinya tidak selalu konsisten dengan strategi negara bersangkutan seperti terdapat dalam master plannya.

Allison mengingatkan bahwa ketiga model ini satu dengan yang lain saling melengkapi karena tidak ada satu modelpun yang sempurna untuk dapat mengupas masalah politik luar negeri yang sangat kompleks. Pengambilan keputusan tidak dapat disederhanakan hanya pada masalah rasionalitas para aktor pengambil keputusan karena mereka juga terikat

¹⁴ Sidik Jatmika, AS, Penghambat Demokrasi, Membongkar Politik Standar Ganda AS, Yogyakarta, Bigraf, 2000, hal 24-31

pada aturan perundang-undangan atau prosedur birokrasi di negaranya. Sebaliknya, pengambilan keputusan oleh birokrasi tidak hanya dipengaruhi oleh perilaku birokrasi seperti tampak pada rutinitas birokrasi atau organisasi pemerintahan yang ada di negara bersangkutan, tetapi juga ditentukan oleh para pemimpin pemerintahan sebagai aktor-aktor pengambilan keputusan. Besarnya peran pemimpin sebagai aktor pengambil keputusan menunjukkan bahwa suatu proses pengambilan keputusan juga harus dilihat dari proses politik yang terjadi di dalam negeri negara bersangkutan.¹⁵

Pengambilan keputusan dalam proses kebijakan peningkatan ekspor lebih banyak menekankan pada pertimbangan rasional para aktor yang terlibat di dalamnya. Pertimbangan rasional pemerintah dan pengusaha pertekstilan lebih banyak mendominasi dalam proses pengambilan keputusan mengenai ekspor termasuk pembaharuan mesin-mesin industri.

Tindakan luar negeri suatu pemerintah menurut James C. Scott dipengaruhi oleh lingkungannya, seperti budaya tradisional, pengalaman, pendidikan dan lain sebagainya. Dalam lingkungan kepemimpinan yang paternalistik, James C. Scott melihat bahwa tindakan-tindakan elit dalam pengambilan keputusan tidak lepas dari motivasi untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan jangka pendek.¹⁶

¹⁵ James E. Dougherty & Robert L. Pfaltzgraff, Jr, *op cit.*, hal 465

¹⁶ Dahlan Nasution, *Politik Internasional, Teori dan Konsep*, Erlangga, Jakarta, 1996, hal 15

Ekspor tekstil Indonesia ke Uni Eropa merupakan wujud adanya relasi perdagangan bebas antara Indonesia dan negara-negara Uni Eropa yang saling menguntungkan. Hal ini telah menjadi bagian dari pemahaman para elit bahwa keterbukaan terhadap pasar bebas akan berdampak positif pada perkembangan ekonomi dalam negeri Indonesia.

Dengan posisi Indonesia sebagai pemain industri tekstil 10 besar dunia, Indonesia berpeluang cukup besar untuk meningkatkan penetrasi pasarnya di pasar luar negeri ke Uni Eropa. Pada 2006, Indonesia merupakan pemasok keempat terbesar di pasar tekstil AS dengan nilai pasok US\$ 3,9 juta, pemasok tekstil dan produk tekstil kesepuluh terbesar di pasar Uni Eropa dengan nilai EUR 1,57 juta, dan pemasok kain dan benang ketiga terbesar di Jepang dengan nilai pasok USD 349 juta. Peluang Indonesia untuk meningkatkan pangsa pasarnya menjadi semakin besar dengan adanya aksi *safeguard* oleh AS terhadap tekstil dan produk tekstil China yang meliputi 22 kategori dan oleh Uni Eropa yang meliputi 10 kategori tekstil dan produk tekstil. Aksi ini akan diikuti juga oleh negara-negara lain seperti Turki dan Brazil sehingga akan memperbesar peluang bagi eksportir non China termasuk Indonesia.¹⁷

Teori pengambilan keputusan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis keputusan-keputusan yang diambil pemerintah Indonesia untuk meningkatkan efisiensi produksi tekstil, sehingga mempunyai keunggulan bersaing di Uni Eropa. Keputusan-keputusan yang diambil tersebut mengakomodir kepentingan berbagai kelompok yang terlibat dalam industri tekstil.

¹⁷ Opcit, Ermina Miranti, 2007, hal 7.

2. Teori Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional masuk dalam ranah ekonomi politik yang mempelajari hubungan timbal balik antara tindakan-tindakan ekonomi dengan kekuasaan (power) pemerintah atau negara¹⁸. Ada 3 isu utama yang menurut Robert Gilpin (1997) selalu dipelajari dalam ekonomi politik internasional yaitu 1) isu bahwa terdapat hubungan antara perubahan ekonomi dan perubahan politik, 2) isu mengenai penyebab atau hal-hal yang mempengaruhi perkembangan pasar, dan 3) isu adanya pengaruh yang signifikan dari ekonomi pasar dunia terhadap ekonomi domestik.¹⁹

Teori perdagangan internasional digunakan karena kebijakan ekspor harus disesuaikan dengan kebijakan internasional di bidang perdagangan yang dibuat oleh WTO. Pemberlakuan kuota dan pencabutan kuota adalah hasil dari kesepakatan untuk menerapkan perdagangan bebas WTO. Pemerintah Indonesia mau tidak mau harus mengikuti kesepakatan yang telah dibuat WTO yaitu mengikuti aturan main perdagangan bebas dunia di mana pemerintah tidak banyak melibatkan diri secara langsung dalam ekspor tekstil. Penerapan WTO telah berdampak langsung terhadap kemampuan industri tekstil Indonesia di mana menjadi semakin sulit menghadapi persaingan dengan negara lain.

Perdagangan internasional merupakan perkembangan lebih lanjut keberhasilan industrialisasi yang dirintis melalui berbagai penemuan

¹⁸ Yanuar Ikbar, *Ekonomi Politik Internasional*, Angkasa, Bandung., 1995 hal 3

¹⁹ Ibid, hal 5.

mesin-mesin industri sejak abad pertengahan. Industrialisasi menciptakan mata rantai perekonomian yang membentuk pola kehidupan ekonomi dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Industrialisasi mampu mempercepat proses produksi sehingga membutuhkan lebih banyak lagi bahan mentah dan bahan baku. Produksi yang berlimpah dan kebutuhan bahan mentah telah mendorong negara-negara industri untuk menjalin kerjasama dengan negara lain, baik dengan maksud menjual hasil-hasil industri maupun mendapatkan bahan mentah atau faktor produksi lainnya.

Perdagangan internasional terkait erat dengan liberalisasi perdagangan yang tidak menghendaki adanya hambatan-hambatan oleh negara dalam perdagangan internasional. Konsep perdagangan internasional dapat dipahami dari adanya hubungan perdagangan antara satu negara dengan negara-negara lain yang tercermin pada kegiatan ekspor dan impor. Ekspor dapat diartikan sebagai kegiatan yang menyangkut produksi barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara untuk dikonsumsi di luar batas negara tersebut.²⁰ Lebih jelas lagi, Deliarnov menambahkan bahwa ekspor merupakan kelebihan produksi dalam negeri yang kemudian kelebihan produksi tersebut dipasarkan di luar negeri.²¹

Pengertian ekspor menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 182/MPP/Kep/4/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor, menyatakan bahwa ekspor adalah kegiatan mengeluarkan

barang dan jasa dari daerah kepabeanan suatu negara. Adapun daerah kepabeanan sendiri didefinisikan sebagai wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Perdagangan internasional terjadi karena adanya pembagian kerja internasional yang didasarkan pada keunggulan dari suatu Negara dalam menghasilkan suatu komoditas daripada Negara-negara lain, sementara negara bersangkutan merasa lebih menguntungkan apabila hanya memproduksi barang tertentu dan merasa lebih menguntungkan apabila mendatangkan produk dari luar negeri untuk mencukupi kebutuhan negara bersangkutan. Dalam konteks global, perdagangan internasional harus menyesuaikan diri dengan globalisasi. Secara makro teori globalisasi ekonomi dapat diartikan sebagai sebuah teori yang didasarkan atas asumsi perdagangan bebas/pasar bebas di seluruh dunia, tanpa adanya hambatan baik dalam bentuk tarif atau non tarif.²² Namun secara mikro, globalisasi ekonomi dapat diartikan sebagai sebuah inisiatif bisnis yang didasarkan atas kepercayaan bahwa dunia telah menjadi sedemikian homogen, seiring dengan makin mengaburnya perbedaan nyata antar pasar domestik.

²⁰ Triyoso, Bambang. "Model Ekspor Non Migas Indonesia Untuk Proyeksi Jangka, Pendek". *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*. 1994, 32(2) : 210.

²¹ Deliarnov. 1995. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: UI Press, hal 202 – 203.

²² Hamdy, Hady. 2001. *Ekonomi Enternasional – Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional*. Buku 1, Edisi Revisi Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 48.

Walaupun menerapkan liberalisasi, pada kenyataannya banyak negara-negara besar seperti Jepang dan Amerika Serikat melakukan intervensi perdagangan seperti dalam pembatasan kuota tekstil sebelum tahun 2005. Hal ini dapat dipahami mengingat praktek perdagangan yang dilakukan merupakan cerminan dari pemikiran-pemikiran ekonomi politik yang terus berkembang. Sampai pada akhir abad ke 17, surplus ekspor yang terus menerus dalam perdagangan terus memberikan keuntungan bagi negara yang bersangkutan. Melalui kekuasaannya, pemerintah terus mendorong kegiatan ekspor dan menerapkan berbagai hambatan non tarif terhadap produk-produk asing yang akan masuk ke negaranya.²³

Pemikiran ekonomi muncul sebagai koreksi terhadap berbagai praktek perdagangan yang dianggap tidak adil. Para ahli ekonomi politik internasional seperti David Ricardo dan Adam Smith berhasil meyakinkan para pelaku ekonomi baik swasta maupun pemerintah bahwa ekonomi memiliki mekanisme sendiri untuk mendapatkan kemakmuran bagi masyarakat di negaranya dan masyarakat dunia.²⁴ Keputusan-keputusan ekonomi sebaiknya diserahkan kepada para pelaku ekonomi (*Economic Agent*) itu sendiri. Pemerintah tidak perlu terlibat dalam kegiatan ekonomi secara langsung, kecuali menjamin adanya kepastian hukum, legalitas, moral dan institusi-institusi sosial yang memadai.

Pemikiran yang demikian tidak seketika menghapuskan

²³ Yanuar Ikbar, Opcit, hal 39.

²⁴ Ibid, hal 44

keterlibatan langsung dari pemerintah. Intervensi pemerintah dinilai tetap dibutuhkan untuk memberikan perlindungan kepada kegiatan perekonomian dalam negeri. Misalnya pelarangan impor, pembatasan impor, pemberian insentif ekspor, subsidi bagi industri dan sebagainya merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Ketika negara-negara dalam satu kawasan bekerjasama membentuk area perdagangan bersama, muncul kecurigaan dari negara-negara lain bahwa hal tersebut merupakan bentuk blok perdagangan baru sebagai upaya untuk melakukan proteksi ekonomi bersama sehingga menghambat komoditas lain masuk di kawasan tersebut.²⁵

Teori perdagangan internasional dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tindakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengikuti ketentuan pasar bebas WTO guna mendorong dan meningkatkan ekspor tekstil dan produks tekstil ke Uni Eropa.

F. Hipotesis

Berdasarkan kerangka teori di atas, diajukan hipotesis bahwa: strategi Indonesia dalam menghadapi persaingan dengan negara-negara penghasil tekstil lainnya guna memperluas pasar ekspor tekstil ke Uni Eropa dilakukan dengan meningkatkan efisiensi produksi tekstil serta memperluas pasar ekspor tekstil dan produk tekstil ke Uni Eropa.

²⁵ Praktek demikian banyak dilakukan oleh negara-negara maju, yaitu suatu kebijakanyang lebih dikenal dengan istilah neo merkantilitme

G. Metode Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempermudah penelitian, maka penelitian ini menitikberatkan pada upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan ekspor tekstil ke Uni Eropa antara tahun 2005 hingga tahun 2008. Pertimbangannya, pada tahun 2005 telah ada penghapusan kuota ekspor oleh Uni Eropa sehingga semua Negara bebas masuk ke Uni Eropa. Akibatnya persaingan antar Negara-negara industri tekstil semakin ketat. Dipilihnya tahun 2008 karena dampak krisis di Amerika Serikat sudah mulai dirasakan oleh industri tekstil sehingga tidak ada pilihan lain bagi pemerintah untuk mencari pasar alternatif.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini mempergunakan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan yang menggunakan sumber data dari literatur, jurnal, artikel-artikel, majalah, surat kabar, dan situs internet.

3. Metode Analisis Data

Penelitian ini dianalisis dengan teknik analisis deskriptif, yang berarti data dan fakta yang diperoleh dan berdasarkan teori akan dianalisis secara sistematis, sehingga dapat memperlihatkan hubungan atau korelasi antara fakta yang satu dengan fakta yang lain.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan studi hubungan internasional ini disusun secara sistematis mulai dari bab pendahuluan, isi dan penutup dengan perincian sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, landasan teori yang digunakan untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan.

Bab II mendeskripsikan perdagangan internasional di bidang tekstil yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara lain. Bab ini secara khusus mengkaji daya saing produk tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia di luar negeri. Negara-negara mana saja yang menjadi pesaing Indonesia dalam menembus pasar dunia, khususnya pasar Uni Eropa dideskripsikan di bab II.

Bab III mendiskripsikan persaingan ekspor tekstil di pasar internasional. Bab ini meliputi negara-negara produsen tekstil, strategi yang diterapkan negara kompetitor dalam ekspor tekstil, serta kondisi ekspor tekstil Indonesia di Uni Eropa.

Bab IV mendiskripsikan strategi kebijakan yang telah ditempuh pemerintah Indonesia dalam meningkatkan daya saing ekspor TPT di Uni Eropa. Strategi ini terbagi menjadi dua yaitu strategi di dalam negeri yaitu memberikan kemudahan ekspor serta berbagai kebijakan lain yang dapat meningkatkan efisiensi produksi TPT Indonesia, serta strategi untuk memperluas pasar ekspor tekstil dan produk tekstil ke Uni Eropa.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya.